LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Jln. Raya Bukittinggi- Payakumbuh KM.14 Baso

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bukittinggi, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Gigih Tri Pambudi, MM
NIP. 19661017.199403.1.001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.2 Belanja
B.3. Belanja Pegawai
B.4. Belanja Barang
B.5. Belanja Modal
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1. Aset Lancar
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1.2. Piutang Bukan Pajak
C.1.3. Persediaan
C.2. Aset Tetap
C.2.1. Tanah
C.2.2. Peralatan dan Mesin
C.2.3. Gedung dan Bangunan
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.3. Aset Lainnya
C.3.1. Aset Tak Berwujud
C.3.2. Aset Lain-lain
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
C.4. Kewajiban Jangka Pendek
C.4.1. Uang Muka dari KPPN
C.4.2. Utang Kepada Pihak Ketiga I
C.4.3. Utang yang Belum Ditagihkan
C.5. Ekuitas
C.5.1. Ekuitas
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
D.2.	Beban Pegawai
D.3.	Beban Persediaan
D.4.	Beban Barang dan Jasa
D.5.	Beban Pemeliharaan
D.6.	Beban Perjalanan Dinas
D.7.	Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.9.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.10.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
- E.4. Transaksi Antar Entitas
  - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
- F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
- F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Gigih Tri Pambudi, MM
NIP. 19661017.199403.1.001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp657.686.608,00 atau mencapai 65,77% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.000.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp6.196.549.970,00 atau mencapai 38,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.291.021.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 41.424.558.487,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.569.958.426,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp39.853.407.671,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.192.390,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp895.299.962,00 dan Rp40.529.258.525,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp657.700.961,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.222.588.608,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.564.887.647,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp310.178,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.564.577.469,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp41.554.972.632,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6.564.577.469,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.538.863.362,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 40.529.258.525,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022			30 Juni 2021
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.000.000.000,00	657.686.608,00	65,77	389.510.805,00
Jumlah Pendapatan		**1.000.000.000,00**	**657.686.608,00**	**65,77**	**389.510.805,00**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	4.559.887.000,00	2.152.404.546,00	47,20	2.502.180.072,00
Belanja Barang	B.4.	11.701.134.000,00	4.044.145.424,00	34,56	3.112.424.848,00
Belanja Modal	B.5.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		**16.291.021.000,00**	**6.196.549.970,00**	**38,04**	**5.614.604.920,00**

II. NERACA

BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
NERACA
PER 30 JUNI 2022 dan 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	230.000.000,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	324.531,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	1.339.633.895,00	13.874.475,00
Jumlah Aset Lancar		**1.569.958.426,00**	**13 874 475,00**
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	22.829.600.000,00	22.829.600.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	44.149.660.993,00	44.149.660.993,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	11.216.085.500,00	11.216.085.500,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	903.834.150,00	903.834.150,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	80.232.500,00	80.232.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	- 39.326.005.472 ,00	-37.639.553.237,00
Jumlah Aset Tetap		**41.424.558.487,00**	**41.539.859.906,00**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	1.651.000,00	1.651.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-6.573.610,00	-6.527.749,00
Jumlah Aset Lainnya		**1.192.390,00**	**1.238.251,00**
Jumlah Aset		**41.424.558.487,00**	**41.554.972.632,00**
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1.	230.000.000,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.4.2.	609.962.300,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.3.	55.337.662,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**895.299.962,00**	**0,00**
Jumlah Kewajiban		**895.299.962,00**	**0,00**
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	40.529.258.525,00	41.554.972.632,00
Jumlah Ekuitas		**40.529.258.525,00**	**41.554.972.632,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**41.424.558.487,00**	**41.554.972.632,00**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	657.700.961,00	340.142.831,00
JUMLAH PENDAPATAN		**657.700.961,00**	**340.142.831,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.726.366.846,00	2.502.180.072,00
Beban Persediaan	D.3.	122.739.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.176.528.805,00	882.300.349,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	355.748.615,00	212.980.848,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.154.707.246,00	587.592.195,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.686.498.096,00	1.761.766.809,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**7.222.588.608,00**	**5.946.820.273,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-6.564.887.647,00**	**-5.606.677.442,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	310.178,00	49.367.974,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**310.178,00**	**49.367.974,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**-6.564.577.469,00**	**-5.557.309.468,00**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 dan 30 JUNI 2021

Uraian	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	41.554.972.632,00	44.442.272.281,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.564.577.469,00	-5.557.309.468,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.538.863.362,00	5.225.094.115,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.025.714.107,00	-332.215.353,00
EKUITAS AKHIR	**E.6.**	**40.529.258.525,00**	**44.110.056.928,00**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi

Berdiri tahun 1972 dengan nama Laboratorium Kesehatan Hewan Bukittinggi Type C, tahun 1974 meningkat menjadi Laboratorium type B, Berdasarkan SK Mentan No. 315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978 menjadi Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II Bukittinggi dengan wilayah kerja 4 provinsi yaitu : Sumtera Barat, Riau, dan Jambi . Selanjutnya berdasarkan SK mentan No. 457/Kpts/OT.210/VIII/2001 pada tanggal 20 Agustus 2001 berubah menjadi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner. Sejak tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Permentan No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 mengenai Organisasi dan Tata Kerja berganti nama menjadi Balai Veteriner (B-Vet) Bukittinggi yang mempunyai wilayah kerja 4 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kep. Riau.Balai Veteriner Bukittinggi adalah unit pelaksana teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen .Entitas berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 14. Po Box 35 Bukittinggi.

Balai Veteriner terdiri dari beberapa Laboratorium yang berperan khusus dalam penyidikan dan pengujian kesehatan hewan diwilayah regionalnya di Indonesia.Balai Veteriner Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Veteriner Bukittinggi berkomitmen dengan visi *"**melalui Penyidikan dan Pengujian Veteriner yang modern, mewujudkan Regional II terjamin aman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinernya..***.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner

Regional II Bukittinggi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.459.887.000,00	4.459.887.000,00
Belanja Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.087.300.000,00	1.110.220.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.249.270.000,00	1.143.470.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.874.206.000,00	2.833.130.000,00
Belanja Jasa	835.685.000,00	862.445.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.001.548.000,00	962.968.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.290.880.000,00	2.841.401.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	5.120.000.000,00	1.947.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.530.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah Belanja	**21.548.776,00**	**16.291021.000,00**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp657.686.608,00 atau mencapai 65,77% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
Akun Pendapatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.000.000.000,00	543.633.000,00	54,36
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	1.200.000,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	5.497.961,00	0,00
Pendapatan Jasa Pengawasan/ Pemeriksaan	0,00	60.000,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	99.810.000,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	7.500.000,00	0,00
Jumlah	**1.000.000.000,00**	**657.700.961,00**	**65,77%**

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 68,85% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	.%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	543.633.000,00	329.225.500,00	65,12
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.200.000,00	5.071.331,00	-76,34
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.173.430,00	0,00	0
Pendapatan Jasa Pengawasan/ Pemeriksaan	60.000,00	1.118.000,00	-94,63
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	99.810.000,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Belanja Modal TA yang Lalu	0,00	49.367.974,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	7.500.000,00	4.728.000,00	5,07
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	280.178,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	.%
Penerimaan kembali Belanja Barang TA yang Lalu	30.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**657.686.608,00**	**398.510.805,00**	**68,85**

Keterangan :

- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya berupa jasa pemeriksaan sampel dari aplikan/pengguna jasa
- Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berupa Sewa Asrama dan Aula
- Sewa tanah gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas yang dipotong lewat gaji
- Pendapatan Jasa Pengawasan dan Pemeriksaan berupa pendapatan pemeriksaan sampel Kesmavet (berupa daging, telur dan daging olahan)
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Denda keterlambatan penyelesaian kontrak kerja dengan pihak ketiga.
- Pendapatan Jasa Pengembangan SDM berupa pendapatan penelitian/koas/magang mahasiswa/pihak ketiga.
- Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan Uang makan Tahun Anggaran 2021.
- Penerimaan kembali Belanja Barang TA yang Lalu berupa kelebihan pembayaran pengadaan Bantuan Pemerintah berupa Ternak Kambing Tahun Anggaran 2021.
- Pendapatan Jasa Pengawasan dan Pemeriksaan berupa pendapatan pemeriksaan sampel Kesmavet (berupa daging, telur dan daging olahan)

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp6.196.549.970,00 atau 38,04% dari anggaran belanja sebesar Rp16.291.021.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2022

Uraian	2022		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	4.559.887.000,00	2.152.774.904,00	47,21
Belanja Barang	11.701.134.000,00	4.044.145.424,00	34,56
Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	**16.291.021.000,00**	**6.196.920.328,00**	**38,11**
Pengembalian Belanja		**-370.358,00**	**0.00**
Total Belanja	**16.291.021.000,00**	**6.196.549.970,00**	**38,04**

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 10,36% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	.%
Belanja Pegawai	2.152.404.546,00	2.502.180.072,00	-13,98
Belanja Barang	4.044.145.424,00	3.112.424.848,00	29,94
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja	**6.196.549.970,00**	**5.614.604.920,00**	**10,36**

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.152.404.546,00 dan Rp2.502.180.072,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -13,98% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1.- Adanya 1 orang PNS Pensiun dan 4 orang CPNS yang baru masuk

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.135.134.904,00	2.454.574.639,00	-13,01
Belanja Lembur	1.7640.000,00	50.136.000,00	-64,82
Jumlah Belanja Kotor	**2.152.774.904,00**	**2.504.710.639,00**	**-14,05**
Pengembalian Belanja Pegawai	**-370.358,00**	**-2.530.567,00**	**-85.36**
Jumlah Belanja	**2.152.404.546,00**	**2.502.180.072,00**	**-13.98**

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.044.145.424,00 dan Rp3.112.424.848,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29,94% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena Anggaran Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	451.072.996,00	462.305.300,00	-2,43
Belanja Barang Non Operasional	308.156.804,00	131.334.560,00	134,63
Belanja Barang Persediaan	1.368.923.420,00	1.424.403.456,00	-3,89
Belanja Jasa	371.405.005,00	288.660.489,00	28,66
Belanja Pemeliharaan	317.302.415,00	218.128.848,00	45,47
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.121.984.784,00	587.592.195,00	90,95
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	105.300.000,000	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**4.044.145.424,00**	**3.112.424.848,00**	**29,94**
Pengembalian Belanja Barang	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**4.044.145.424,00**	**3.112.424.848,00**	**29,94**

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 sama dengan TA 2021 yaitu 0,00. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Sumber dana berasal dari PNBP sehingga realisasi kegiatan menunggu realisasi PNBP

Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp230.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP Rupiah Murni Rp.210.000.000,00 dan UP PNBP Rp.20.000.000,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2022

Uraian	30 Juni 2022
Kas Di Bendahara Pengeluaran berupa UP Rupiah Murni	210.000.000,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran berupa UP PNBP	20.000.000,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	**230.000.000,00**

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp324.531,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan jenis aset dalam bentuk pendapatan sewa tanah,gedung dan bangunan rumah dinas yang di potong langsung dari gaji pegawai bulan Juli 2022. Piutang Bukan Pajak dikarenakan pembuatan SPP gaji bulan Juli 2022 dibuat bulan Juni dan pemotonganan dilakukan saat terbit SP2D pada tanggal 1 Juli 222.. Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Piutang Bukan Pajak	324.531,00	0,00
Jumlah	**324.531,00**	**0,00**

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.339.633.895,00 dan Rp13.874.475,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk

dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	89.120.695,00	7.848.725,00
Bahan untuk Pemeliharaan	5.662.750,00,00	5.662.750,00
Suku Cadang	230.568.400,00	363.000,00
Bahan Baku	716.580.050,00	0,00
Persediaan Lainnya	297.702.000,00	0,00
Jumlah	**1.339.633.895,00**	**13.874.475,00**

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp22.829.600.000,00 dan Rp22.829.600.000,00.

No	Nama Barang	Kepemilikan	Nilai Buku	jml (m2)	No. PSP
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	862.073.000	1.421	140/KM.6/ WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	676.080.000	1.200	140/KM.6/ WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
3	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	1.101.447.000	1.955	140/KM.6/ WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	20.190.000.000	45.000	140/KM.6/ WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
		TOTAL	**22.829.600.000**		

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.149.660.993,00 dan Rp44.149.660.993,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.216.085.500,00 dan Rp11.216.085.500,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp903.834.150,00 dan Rp903.834.150,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp80.232.500,00 dan Rp80.232.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-39.326.005.472,00 dan Rp-37.639.553.237,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	44.149.660.993,00	-35.660.264.830,00	8.489.396.163,00
2.	Gedung dan Bangunan	11.216.085.500,00	-3.313.069.589,00	7.903.015.911,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	903.834.150,00	-352.671.053,00	598.119.062,00
4.	Aset Tetap Lainnya	80.232.500,00	0,00	80.232.500,00
Akumulasi Penyusutan		**56.349.813.143,00**	**-39.326.005.472,00**	**17.070.763.636,00**

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berbentuk Software **Aplikasi Isikhnas**.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	**6.115.000,00**

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.651.000,00 dan Rp1.651.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Sumur Artesis dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-6.573.610,00 dan Rp-6.527.749,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	1.651.000,00	-458.610,00	1.192.390,00
Akumulasi Penyusutan		**7.766.000,00**	**-6.573.610,00**	**1.192.390,00**

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp230.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan Desember 2021 adalah masing – masing sebesar Rp 609.962.300,00 dan Rp 0,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Kontrak kerja dengan pihak ketiga yang sedang dalam proses pengerjaan atau belums selesai pengerjaannya dan dalam aplikasi Sakti sudah tercatat berupa ADK Kontrak sehingga muncul menjadi akun Utang Kepada Pihak Ketiga.

C.4.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan Desember 2021 adalah Rp 55.337.662,00 dan Rp 0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kuitansi-kuitansi belanja yang belum di GU. Karena untuk GU memiliki batas minimal sebesar Rp 105.000.000,00.

C.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.529.258.525,00 dan Rp41.554.972.632,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp657.700.961,00 dan Rp340.142.831,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	.%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	543.633.000,00	329.225.500,00	65,12
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.200.000,00	5.071.331,00	-76,34
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.173.430,00	0,00	0
Pendapatan Jasa Pengawasan/ Pemeriksaan	60.000,00	1.118.000,00	-94,63
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	99.810.000,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Belanja Modal TA yang Lalu	0,00	49.367.974,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	7.500.000,00	4.728.000,00	5,07
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	280.178,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Belanja Barang TA yang Lalu	30.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**657.686.608,00**	**398.510.805,00**	**68,85**

Pendapatan pemeriksaan sampel pemeriksaan sampel Kesmavet (berupa daging, telur dan daging olahan) lebih sedikit dari tahun per Bulan Juni 2021 jika dibandingkan Pendapatan Pemeriksaan sampel dari bulan per Juni 2022. Tahun 2022 menerima pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah lembih besar. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.726.366.846,00 dan Rp2.502.180.072,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.904.963.980,00	1.672.851.020,00	13,88
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.936,00	24.397,00	18,60
Beban Tunj. Anak PNS	46.598.834,00	44.006.606,00	5,89
Beban Tunj. Beras PNS	112.251.000,00	103.415.760,00	8,54
Beban Tunj. Fungsional PNS	278.070.000,00	259.080.000,00	7,33
Beban Tunj. PPh PNS	16.508.726,00	14.781.839,00	11,68
Beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000,00	11.880.000,00	36,36
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	144.151.370,00	132.750.450,00	8,59
Beban Tunjangan Umum PNS	35.345.000,00	28.500.000,00	24,02
Beban Uang Lembur	17.640.000,00	50.136.000,00	-64,82
Beban Uang Makan PNS	154.609.000,00	184.754.000,00	-16,32
Jumlah	**Rp2.726.366.846,00**	**2.502.180.072,00**	**8,96**

Perbandingan beban Pegawai lebih besar per Juni 2022 jika dibandingkan per Juni 2021 karena adanya PNS purnabakti sebanyak 1 orang dan penambahan CPNS 2022 sebanyak 4 orang.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 122.739.000,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	122.059.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan konsumsi	680.000,00	0,00	0,00
Beban persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**122.739.000,00**	**0,00**	**0,00**

Persediaan Bahan baku berupa bahan dan peraltan pengujian laboratorium

Persediaan konsumsi berupa bahan keperluan sehari – hari perkantoran.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.528.805,00 dan Rp882.300.349,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	93.814.600,00	80.095.300,00	17,13
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	13.417.500,00	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	167.632.204,00	37.821.760,00	343,22
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	11.010.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.400.000,00	79.330.000,00	3.87
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	7.350.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	19.669.875,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	23.100.000,00	2.700.000,00	755,56
Beban Keperluan Perkantoran	411.345.996,00	229.082.000,00	79,56
Beban Langganan Air	0,00	922.900,00	-100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73.065.361,00	44.206.000,00	65,28
Beban Langganan Listrik	238.251.405,00	232.322.260,00	2,55
Beban Langganan Telepon	1.139.364,00	1.159.329,00	-1,72
Beban Honor Output Kegiatan	49.110.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa	17.000.000,00	0,00	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	129.894.200,00	-100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	12.989.100,00	-100,00
Jumlah	**1.176.528.805,00**	**882.300.349,00**	**33,35**

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp355.748.615,00 dan Rp212.980.848,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.670.000,00	31.409.500,00	-94,68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	327.673.615,00	181.571.348,00	80,47
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	26.405.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**355.748.615,00**	**212.980.848,00**	**67,03**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp355.748.615,00 dan Rp587.592.195,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	799.170.701,00	450.938.323,00	77,22
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	43.381.500,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	3.450.000,00	-39,13
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	353.436.545,00	89.822.372,00	293,48

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Jumlah	**1.154.707.246,00**	**587.592.195,00**	**96.52**

D.7. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat

Jumlah Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat adalah merupakan beban untuk mencatat barang fisik berupa ternak sapi,kambing/domba dan ayam yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Rincian Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masayarakat	0,00	0,00	-0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.686.498.096,00 dan Rp1.761.766.809,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	331.306.954,00	331.306.955,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	5.415.592,00	5.415.592,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10.865.749,00	10.865.749,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.196.640,00	7.196.640,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	45.861,00	45.861,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.331.667.300,00	1.406.936.012,00	-5,35
Jumlah	**1.686.498.096,00**	**1.761.766.809,00**	**-4,27**

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBP	0,00	0,00	-0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	49.367.974,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	280.178,00	0,00	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	30.00,00	0,00	
Jumlah	**310.178,00**	**49.367.974,00**	**2.665,52**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 41.554.972.632,00 dan Rp44.442.272.281,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp-6.564.577.469,00 dan Rp-5.557.309.468,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.538.863.362,00 dan Rp5.225.094.115,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.196.549.970,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2022
Diterima dari Entitas Lain	- 657.686.608,00
Jumlah	**5.538.863.362,00**

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-657.686.608,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.196.549.970,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.529.258.525,00 dan Rp44.110.056.928,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

a. DAFTAR RINCIAN REVISI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

SATKER	NOMOR DIPA	DIGITAL STEMP	TGL.REVISI DIPA	ANGGARAN	KET
239523	SP DIPA-018.06.2.239523/2022	9841-8404-4224-1894	17 November 2021	21.548.776.000	DIPA AWAL
	SP DIPA-018.06.2.239523/2022 Revisi I	4879-0584-5033-0940	17 Februari 2022	16.711.276.000	Pengurangan/ Revocusing Belanja Ternak Ruminansia Potong (PEN)
	SP DIPA-018.06.2.239523/2022 Revisi II	4879-0584-5033-0940	16 Maret 2022	16.711.276.000	Penghapusan pengadaan ternak Sapi.
	SP DIPA-018.06.2.239523/2022 Revisi III	7155-2647-6322-9403	24 Mei 2022	16.291.021.000	Pengurangan/ Revocusing Belanja Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)
	SP DIPA-018.06.2.239523/2022 Revisi IV	7155-2647-6322-9403	13 Juli 2022	16.291.021.000	Pemutakhiran hal. 3 DIPA

b. PENJELASAN ATAS KOREKSI / PERBAIKAN DARI HASIL REVIU

1.1. Selisih nominal akun Beban Langganan Daya dan Jasa dan Beban Honor Output Kegiatan pada Laporan Operasional dengan Belanja Langganan Daya dan Jasa dan Belanja Honor Output Kegiatan pada Neraca Percobaan Kas dikarenakan kuitansi kegiatan bulan Juni belum di GU pada bulan Juni, sehingga di dalam LO sudah tercatat dan dalam Neraca Percobaan Kas belum terhitung.

1.2. Terdapat nominal Nol (0) pada akun Beban Barang Persediaan barang Konsumsi dan Beban Barang Persediaan Lainnya pada Laporan Operasional sedangkan akun Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi dan Belanja Barang Persediaan Lainnya senilai masing – masing Rp 13.404.000,- dan Rp 1.355.519.420,- pada Neraca Percobaan Kas. Hal ini dikarenakan beberapa barang yang sudah keluar dari akun tersebut belum di input oleh operator persediaan.

2.1 Selisih nominal akun Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Laporan Operasional dengan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Neraca Percobaan Kas dikarenakan kuitansi kegiatan bulan Juni belum di GU pada bulan Juni, sehingga di dalam LO sudah tercatat dan dalam Neraca Percobaan Kas belum terhitung

2.2 Terdapat nominal Nol (0) pada akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Laporan Operasional sedangkan akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp 105.300.000,- pada Neraca Percobaan Kas.

Hal ini dikarenakan barang sudah biberikan kepada masyarakat/pemda namun akun tersebut belum di input oleh operator persediaan.

3.1 Terdapat nilai pada akun Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp. 26.405.000,- pada Laporan Operasional sedangkan akun Belanja Persediaan Suku Cadang senilai Rp 0,- pada Neraca Percobaan Kas. Nilai pada LO merupakan Stock Awal TA 2022.

3.2 Terdapat nominal Nol (0) pada akun Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan pada Laporan Operasional sedangkan akun Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan senilai Rp 680.000,- pada Neraca Percobaan Kas. Hal ini dikarenakan barang sudah digunakan namun akun tersebut belum di input oleh operator persediaan.

3.3 Selisih nominal akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional dengan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Neraca Percobaan Kas dikarenakan kuitansi kegiatan bulan Juni belum di GU pada bulan Juni, sehingga di dalam LO sudah tercatat dan dalam Neraca Percobaan Kas belum terhitung